

## Doa Mahbubani:Menyiapkan Indonesia bangkit

Menarik kita simak pandangan Kishore Mahbubani, Presiden Dewan Keamanan PBB, profesor, diplomat pemerhati hubungan internasional. Pada 30 Juli 2008, Mahbubani sempat didaulat mengisi Presidential Lecture di Istana Negara. Ada dua pernyataan menarik dari Mahbubani, pertama adalah "SBY" sebagai faktor pendorong pembangunan di Asia dan kedua adalah sikap optimisme terhadap bangkitnya ekonomi Indonesia.

Mahbubani menyebutkan terdapat tiga faktor pendorong pembangunan di kawasan Asia. Ketiga hal itu adalah kontrak sosial yang menguntungkan bagi elite pemerintahan dan masyarakat, kepercayaan pada kemampuan diri dalam meraih sukses, serta terbukanya peluang bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Mahbubani menyebut tiga pendorong tersebut dengan akronim "SBY": Social Contract, Belief, and Youth.

Mahbubani meyakini bahwa transformasi besar tengah terjadi di Asia dan Indonesia akan mengambil bagian dalam transformasi tersebut. Lalu mengapa Mahbubani begitu optimistis, karena Indonesia tergolong negara yang berhasil melewati transisi menuju demokrasi yang semakin matang. Indonesia cukup tangguh, meski terpukul berbagai bencana, teror ledakan bom, mengalami krisis ekonomi dimulai pada penghujung tahun 1998, juga gangguan sosial dan politik sebagai dampak turunan dari krisis ekonomi yang disebabkan lemahnya penerapan sistem dan asas governance, Indonesia tetap konsisten menuju negara demokrasi terbesar kedua di dunia setelah Amerika.

Mahbubani meyakini, saat ini dunia sedang menunggu bangkitnya Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru mengikuti China. Tentu optimisme Mahbubani beralasan tetapi optimisme ini harus kita dukung dengan terlebih dahulu membenahi prasyaratnya, seperti memperbaiki sistem dan asas governance, pencegahan korupsi, dan pemberdayaan masyarakat dari kemelut kemiskinan.

Dalam proses demokratisasi, good governance sering mengilhami para aktivis untuk mewujudkan penyelenggara negara yang memberikan ruang partisipasi dari pilar lain, sehingga ada pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antara negara, partai politik, masyarakat sipil, dan dunia usaha. Adanya pembagian peran yang saling melengkapi antar keempat pilar tersebut, bukan hanya memungkinkan terciptanya "check and balance", melainkan juga menghasilkan sinergi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Secara umum ada beberapa karakteristik yang melekat dalam praktik good governance. Pertama, praktik good governance harus memberi ruang kepada pilar lain untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi di antara mereka. Kedua, dalam praktik good governance terkandung nilai-nilai yang membuat keempat pilar dimaksud dapat lebih efektif bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

### **Bebas korupsi**

Ketiga, praktik good governance adalah praktik bernegara yang bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu praktik penyelenggaraan negara dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, budaya hukum, dan akuntabilitas publik.

Sejak Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG) dikeluarkan oleh KNKG pada 1999 dan terakhir disempurnakan pada 2006, upaya menerapkan GCG di kalangan dunia usaha ada perbaikan. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan hasil rating yang dilakukan oleh lembaga rating dan hasil Annual Report Award yang sudah memasuki tahun ke-7.

Lembaga Rating Internasional juga mengindikasikan ada perbaikan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia meski masih tertinggal dengan negara berkembang lainnya. Ada dua hal penting yang perlu dicatat dari perkembangan ini:

Dorongan terhadap penerapan GCG baru pada tahap taat aturan, belum didukung oleh dorongan etika. Dorongan regulasi ini pun baru efektif jika monitoring dan penegakannya juga dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu, dapat dipahami jika sektor industri yang diatur ketat jauh lebih maju penerapan GCG-nya dibandingkan dengan industri yang tidak diatur secara ketat.

Penerapan GCG belum efektif mengingat negara, partai politik, dunia usaha dan masyarakat madani belum menjalankan good governance secara konsekuen dan seimbang. Sementara itu secara global, penerapan Good Public Governance (GPG) dan Good Corporate Governance (GCG) merupakan bagian dari prasyarat dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia.

Untuk dapat melaksanakan Good Governance, dipandang perlu untuk melengkapi pedoman GPG. Untuk tujuan itulah, KNKG memprakarsai penyusunan pedoman GPG yang dapat menjadi rujukan bagi ranah eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga non-struktural.

Konsep Pedoman GPG ini telah disosialisasikan untuk memperoleh masukan sekaligus membangun kesepakatan dari semua pemangku kepentingan, pada acara Workshop yang diselenggarakan oleh KNKG di Bank Indonesia pada 21 Juli 2008.

Oleh karena itu sangat relevan jika kita semua saling bahu membahu melakukan kampanye nasional dengan: Pertama, melaksanakan secara konsisten penerapan sistem dan asas governance yang baik; Kedua, pencegahan korupsi dan suap; Ketiga, melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan.

Jika Indonesia secara konsisten memelihara dan memperbaiki iklim demokrasi yang semakin matang dan efisien, serta menggalang seluruh kekuatan bangsa untuk secara fokus melaksanakan perbaikan pada aspek governance, pencegahan korupsi, serta pemberdayaan masyarakat agar keluar dari kemelut kemiskinan, Insya Allah do'a Mahbubani untuk Indonesia dapat terkabul.

Oleh Mas Achmad Daniri  
Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)